

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang Penelitian**

Peran akuntansi dalam perkembangan perekonomian yang pesat ini sangat dibutuhkan sebagai alat bantu untuk mengomunikasikan mengenai informasi keuangan, karena masalah yang dihadapi pimpinan dalam menjalankan sebuah instansi baik swasta maupun pemerintah menjadi kompleks dan semakin sulit untuk dikerjakan sendiri salah satu contohnya adalah masalah pengelolaan kas.

Pada hakikatnya setiap perusahaan membutuhkan persediaan kas untuk memenuhi kewajiban pembayaran yang digunakan dalam kegiatan operasional. Setiap kegiatan operasional perusahaan akan selalu membutuhkan pengeluaran kas, sehingga pengeluaran kas merupakan transaksi yang selalu terus terjadi.

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.05/2019 tentang Kebijakan akuntansi pemerintah pusat, pengeluaran kas adalah semua aliran kas yang keluar dari kas umum negara yang mengurangi kas negara. Pengeluaran kas melalui badan usaha negara (BUN) dipengaruhi oleh transaksi belanja, pengeluaran pembiayaan, pengeluaran transfer dan pengeluaran lainnya atau transitoris.

Salah satu badan pemerintah yang melakukan proses pengeluaran kas adalah Badan Pemeriksa Keuangan. Badan Pemeriksa Keuangan yang selanjutnya disingkat menjadi BPK merupakan lembaga negara yang bertugas

dan berwenang melakukan pemeriksaan terhadap pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga negara lainnya, bank indonesia, badan usaha milik negara, badan layanan umum, badan usaha milik daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan UU No. 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan.

Menurut Kusnadi (2000) pengeluaran kas dibagi menjadi dua yaitu pengeluaran kas besar dan pengeluaran kas kecil. Pengeluaran kas kecil adalah dana yang meliputi pembayaran yang tidak menggunakan cek melainkan menggunakan uang tunai. Sedangkan pengeluaran kas besar adalah kas perusahaan yang nilainya besar yang disimpan di bank.

**tabel 1. 1 Jumlah Pengeluaran Kas Kecil Tahun 2018**

<b>Bulan</b>	<b>Jumlah Kas keluar (Rp)</b>	<b>Jumlah Kas Keluar yang Dilaporkan (Rp)</b>	<b>Jumlah Kas Keluar yang Tidak Dilaporkan (Rp)</b>
Januari	35.000.000	33.000.000	2.000.000
Februari	38.000.000	35.500.000	2.500.000
Maret	38.600.000	36.000.000	2.600.000
April	20.077.000	19.000.000	1.077.000
Mei	23.566.500	19.850.000	3.716.500
Juni	28.000.000	24.500.000	3.500.000
Juli	30.325.000	28.630.000	1.695.000
Agustus	29.672.500	26.050.000	3.622.500
September	23.000.000	19.750.000	3.250.000
Oktober	24.300.000	23.000.000	1.300.000
November	40.940.000	40.250.000	690.000
Desember	50.000.000	48.005.500	11.995.000

Sumber: Sub Bagian Keuangan Badan Pemeriksa Keuangan

Berdasarkan pada tabel 1.1 di atas menunjukkan setiap bulannya selalu ada uang yang tidak dilaporkan, hal ini disebabkan karena pegawai yang melakukan perjalanan dinas ketika ada uang anggaran lebih tidak langsung di kembalikan kepada sub bagian keuangan.

**tabel 1. 2 Pengeluaran Kas Besar Tahun 2016-2018**

<b>Uraian</b>	<b>Jumlah kas keluar 2016 (Rp)</b>	<b>Jumlah kas keluar 2017 (Rp)</b>	<b>Jumlah kas keluar 2018 (Rp)</b>
belanja operasi	18.870.439.927	39.558.426.531	42.367.207.000
belanja modal	103.936.700	75.661.890	591.490.000
<b>jumlah pengeluaran</b>	<b>18.974.376.627</b>	<b>39.634.088.421</b>	<b>42.958.697.000</b>

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa jumlah pengeluaran pada Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Jawa Barat dari tahun 2017 sampai tahun 2019 mengalami kenaikan. Hal ini dikarenakan biaya belanja operasional dari tahun 2017 sampai 2019 mengalami kenaikan, sedangkan biaya belanja modal pada tahun 2018 mengalami penurunan dan tahun 2019 mengalami kenaikan kembali.

Berdasarkan wawancara awal dengan Kepala Sub Bagian Keuangan BPK Perwakilan Jawa Barat terdapat beberapa permasalahan yaitu aturan yang membatasi jumlah Uang Persediaan (UP) di brankas Bendahara Pengeluaran sebesar Rp.50.000.000 dan semua kegiatan biayanya menggunakan Uang Persediaan (UP) mulai dari biaya operasional, pembayaran lembur karyawan, pembayaran honorarium, jamuan makan, perjalanan dinas, sehingga terjadinya antrian dalam pengajuan Uang Muka Uang Persediaan (UM-UP) dan keterlambatan pencairan Uang Muka Uang Persediaan (UM-UP) karena

uang masuk dan uang keluar tidak sesuai. Banyaknya karyawan yang menggunakan uang muka uang persediaan dan tidak langsung mengembalikan Uang Persediaan (UP) lebih yang diberikan, dan apabila uang persediaan yang ada di bendahara pengeluaran kurang dari 50% (lima puluh persen) bendahara pengeluaran tidak dapat meminta tambah uang (TU) ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) menyebabkan kegiatan operasional lainnya terhambat.

Berdasarkan permasalahan diatas pengendalian internal sangat diperlukan pada suatu instansi pemerintah. Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 sistem pengendalian intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh Pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keadaan pelaporan keuangan, pengamanan Aset Negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Sistem Pengendalian Internal Pemerintah yang selanjutnya disingkat SPIP.

Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah untuk mencapai pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien transparan dan akuntabel, Menteri/Pimpinan Lembaga, Gubernur, dan Bupati/Walikota wajib melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintah. Sistem Pengendalian Internal Pemerintah terdiri dari lima unsur, yaitu

lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian informasi dan komunikasi, pemantauan pengendalian intern.

Sistem pengendalian internal yang baik akan memberikan jaminan terhadap kualitas dan kinerja menyeluruh, termasuk keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan Pemerintah Negara, keandalan laporan keuangan, pengamanan aset negara, ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan serta memperkuat akuntabilitas yang akhirnya akan mendukung upaya pemerintah untuk mewujudkan tatakelola pemerintah yang baik (*good governance*). Salah satu upaya pemerintah untuk mewujudkan hal tersebut adalah dengan menerbitkan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP). Cikal bakal Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) ini dimulai dengan adanya instruksi Presiden Nomor 15 Tahun 1983 tentang pedoman pelaksanaan pengawasan melekat. Keputusan Menteri Pendayagunaan dan Aparatur Negara Nomor 30 tentang petunjuk pelaksanaan pengawasan melekat yang diperbaharui dengan keputusan Menteri PAN No. KEP/46/M.PAN/4/2004. Unsur-unsur pengawasan melekat adalah pengorganisasian, personal, kebijakan, perencanaan, prosedur, pencatatan, pelaporan, dan *review intern*. Selanjutnya Pemerintah melakukan penyempurnaan atas sistem pengendalian yang telah ada sebelumnya melalui penerbitan Peraturan Pemerintah Nomor. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) yang merupakan adaptasi dari COSO (*The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commissions*).

Pada penelitian sebelumnya Greivy Panambunan Jantje (2016) mengambil judul “Evaluasi Pengendalian Internal dalam Pelaksanaan Sistem dan Prosedur Pengeluaran Kas pada Dinas Koperasi dan UMKM Sulawesi Utara”. Masalah penelitian pengendalian internal dirancang, diimplementasi, dan dipelihara oleh pemilik, pemerintah, manajemen, dan pegawai untuk menangani resiko bisnis dan resiko kecurangan yang diketahui mengancam pencapaian tujuan entitas, seperti pelaporan keuangan yang andal. Dengan menggunakan metode analisis deskriptif. Hasilnya pengendalian internal dalam penerapan sistem dan prosedur pengeluaran kas di Dinas Koperasi dan UMKM Sulawesi Utara telah sesuai.

Pada penelitian yang dilakukan oleh Olivia Novita Lahay (2013) dengan judul “Analisis Pelaksanaan Sistem dan Prosedur Pengeluaran Kas pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Sulawesi Utara. masalah penelitian, perubahan sistem pemerintahan dari sistem sentralisasi menjadi sistem desentralisasi dalam bentuk otonomi daerah telah memberi dampak yang besar pada sistem penyelenggaraan pemerintahan dan ruang lingkup kinerja Hal ini juga berdampak pada pengaturan sistem keuangan pemerintahan di daerah. Metode analisis yang digunakan adalah metode deskriptif yang bertujuan untuk membuat gambaran secara sistematis, faktual dan aktual mengenai fakta-fakta, dengan membandingkan membandingkan antara sistem dan prosedur pengeluaran yang dilakukan oleh dinas pekerjaan umum dengan konsep-konsep tentang efektivitas sistem pengeluaran kas yang dipelajari secara teoritis. Hasil penelitian pelaksanaan sistem dan prosedur pengeluaran kas,

sudah efektif dan sesuai dengan peraturan yang berlaku, untuk pelaksanaan internal kontrol masih kurang efektif untuk pelaksanaan pengendalian otorisasi dan pemisahan fungsi masih belum terlaksana dengan baik.

Pada penelitian yang dilakukan oleh Army Alfiah, dengan judul “Penerapan Sistem Pengendalian Internal Pengeluaran Kas Terhadap Efektivitas Pengeluaran Kas Pada Perkebunan Nusantara XIV di Makasar. Masalah penelitian, sebagai perusahaan yang menguasai wilayah yang sangat luas dengan jumlah pelanggan yang besar, kemungkinan akan adanya tindakan penyelewengan, kecurangan serta kesalahan yang dapat merugikan perusahaan akan terjadi, terutama menyangkut kas perusahaan, karena item pengendalian kas sangat diperlukan agar kegiatan operasional perusahaan berjalan dalam pengeluaran kas dapat berjalan dengan efektif. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa PT Perkebunan Nusantara XIV di makasar telah melaksanakan sistem pengendalian kas dengan baik. Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih mendalam untuk selanjutnya dijadikan bahan penyusunan skripsi dengan judul:

**“EVALUASISISTEMPENGENDALIANINTERNALPENGELUARAN  
KAS KECIL (Studi Kasus Pada Badan Pemeriksa Keuangan Republik  
Indonesia Perwakilan Jawa Barat”**

## **1.2 Identifikasi Masalah**

1. Bagaimana pelaksanaan sistem pengendalian internal pengeluaran kas kecil yang sudah berjalan di Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Jawa Barat
2. Bagaimana sistem pengendalian intern pengeluaran kas kecil di Badan Pemeriksaan Keuangan Perwakilan Provinsi Jawa Barat berjalan dengan baik dan sesuai dengan unsur pengendalian internal menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008
3. Bagaimana upaya meningkatkan sistem pengendalian internal pengeluaran kas kecil di Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Jawa Barat dalam meminimalisir dana yang tidak dilaporkan

## **1.3 Maksud Dan Tujuan**

### **1.3.1 Maksud**

Maksud dari penelitian ini adalah untuk mengumpulkan, menganalisa dan mengolah data-data tentang sistem pengendalian internal terhadap pengeluaran kas kecil.

### **1.3.2 Tujuan**

- 1 Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan sistem pengendalian internal pengeluaran kas kecil yang sudah berjalan di Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Jawa Barat
- 2 Untuk mengetahui bagaimana sistem pengendalian internal pengeluaran kas kecil di Badan Pemeriksaan Keuangan

Perwakilan Provinsi Jawa Barat berjalan dengan baik dan sesuai dengan unsur pengendalian internal menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008

- 3 Untuk mengetahui bagaimana upaya meningkatkan sistem pengendalian internal pengeluaran kas kecil di Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Jawa Barat dalam meminimalisir dana yang tidak dilaporkan

#### **1.4 kegunaan penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak sebagai berikut:

a. Bagi penulis

Penulis mampu menerapkan ilmu pengetahuan yang telah diperoleh di bangku kuliah, serta melatih dan mengembangkan kemampuan analisis, pengamatan dan evaluasi sistem.

b. Bagi Almamater

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan mengenai pengendalian internal pengeluaran kas kecil dan sebagai bahan perbandingan dalam ilmu Akuntansi Keuangan dan sebagai referensi perpustakaan.

c. Bagi Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Jawa Barat.

Penelitian ini diharapkan berguna sebagai masukan mengenai pengendalian internal pengeluaran kas kecil pada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Jawa Barat.

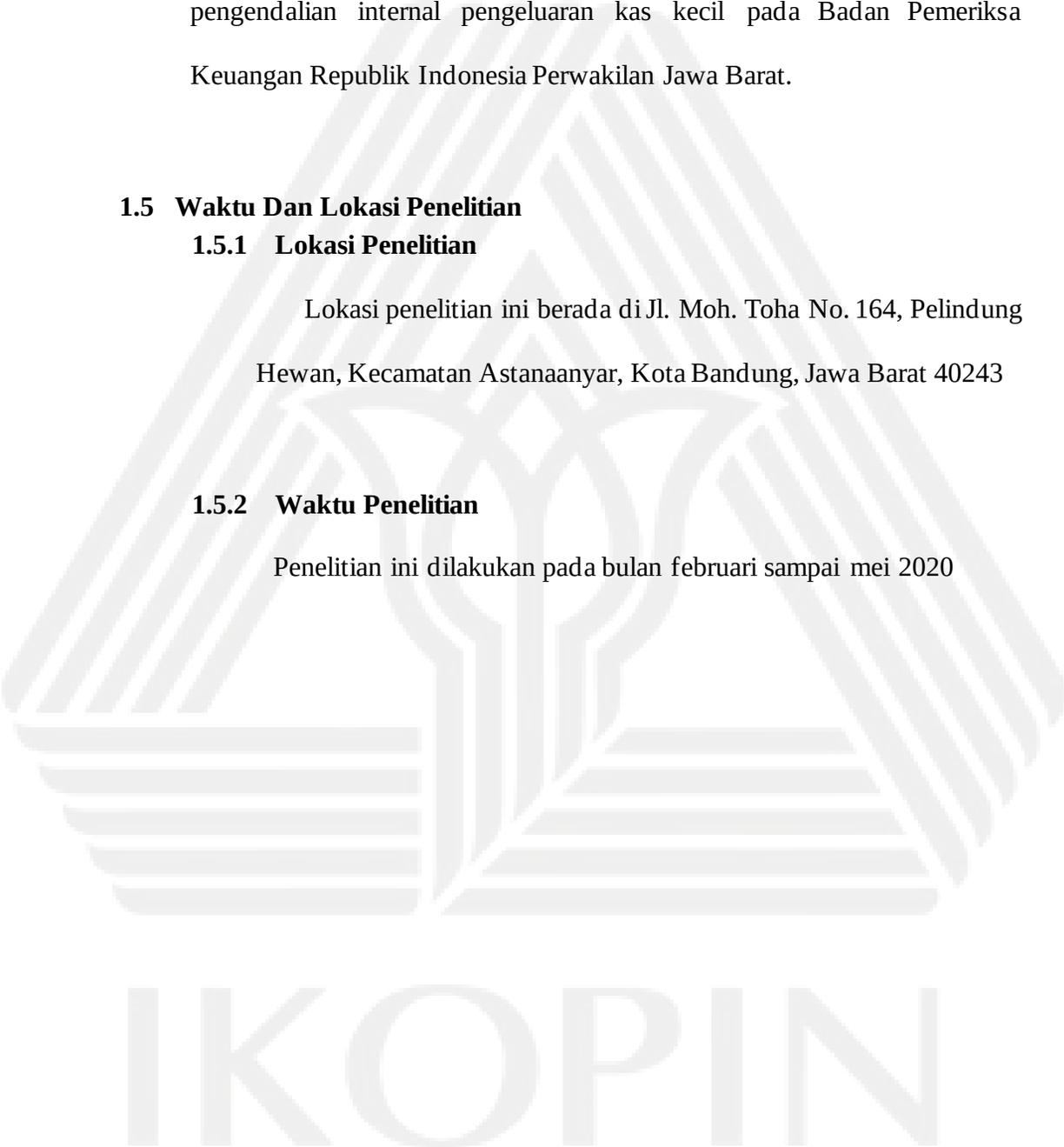
## **1.5 Waktu Dan Lokasi Penelitian**

### **1.5.1 Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian ini berada di Jl. Moh. Toha No. 164, Pelindung Hewan, Kecamatan Astanaanyar, Kota Bandung, Jawa Barat 40243

### **1.5.2 Waktu Penelitian**

Penelitian ini dilakukan pada bulan februari sampai mei 2020



IKOPIN

